

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- . 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- . 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Bayley, D.H.(1985). *Webster's Third New Dictionary*.
- Buku SAKU KPK .2010. *Memahami Gratifikasi*. Cetakan Pertama
- Darwan, Prinst, 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* , Aditya Bakti. Bandung
- Hamdan, M. 1999. *Politik Hukum Pidana*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2005. *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Harahap, Krisna. 2006. *Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung*. Grafitri, Bandung
- Husin, Kadri. 1999. *Diskresi Dalam Penegakan Hukum Pidana di Indonesia*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Lampung: Bandar Lampung.
- Moeljatno, 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan Keduapuluh Dua, Jakarta: Bumi Aksara
- Musni Umar ,Syukri Ilyas. 2004. *Lembaga Pencegah Korupsi*. Gramedia Pustaka
- Rawls, Jhon, 1971, *A Theory of Justice*, Chapter II The Principle of Justice, Publisher: The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, Terjemahan Susanti Adi Nugroho, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group

Saleh, Ruslan.1981. *Beberapa Asas-asas Hukum Pidana dalam Perspektif*.Jakarta: Aksara Baru.

Singarimbun, Masri. 1989 *Metode Penelitian survei*, jakarta LP3ES

Soekanto, Soerjano. 1986. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali: Jakarta.

Soekanto, Soerjano. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan 3*. Universitas Indonesia pres: Jakarta

Universitas Lampung. 2005. *Format Penulisan Karya Ilmiah*. Universitas Lampung: Bandar Lampung.

Undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman